

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara di Asia yang merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam, dengan berbagai jenisnya, di dunia. Indonesia sendiri sangat rawan terjadi bencana gempa bumi dan bencana gelombang tsunami. Sekitar 13% gunung berapi dunia ada di wilayah kepulauan Indonesia, dan seluruhnya berpotensi menimbulkan bencana alam dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda (Belanawane, 2016).

Menurut Nurhalimah (2017), Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif dan banyak pegunungan, karena lokasi Negara Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Indonesia berada pada jalur pertemuan dari lempeng dunia. Banyak rangkaian gunung berapi yang ada di Indonesia. Lempeng Benua Asia di kawasan Barat dan Lempeng Benua Australia di kawasan Timur adalah dua lapisan lempeng benua yang berbeda yang ada di Indonesia.

Salah satu potensi bencana yang tinggi di Indonesia adalah bencana gunung berapi. Gunung Merapi di Jawa, Indonesia, adalah salah satu yang paling aktif dan padat penduduk di dunia, dengan lereng bervegetasi yang curam, rumah bagi lebih dari satu juta orang (S. Jenkins et al, 2000).

Kota Yogyakarta mempunyai salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, yaitu Gunung Merapi (ketinggian puncak 2930 mdpl, per 2010) yang mempunyai potensi bencana yang tinggi. Gunung Merapi dapat mengalami erupsi setiap dua sampai lima tahun sekali, tetapi hal ini belum dapat diprediksi dengan teknologi. Menurut data BMKG tentang riwayat letusan dari Gunung Merapi dari tahun 1990-an sebagai berikut :

Tabel 1
Riwayat Letusan Merapi

Riwayat Letusan Merapi sejak Tahun 1990-an	
Tanggal 2 Februari 1992	Gunung Merapi meluncurkan awan panas dan telah mencapai kaki gunung, bau belerang tercium dari wilayah Jurangrejo, Srumpung, Magelang. Luncuran awan panas lebih dari 15 kali dengan radius guguran mencapai 6,5 kilometer.
Tanggal 22 November 1994	Gunung Merapi meletus pada pukul 10.15 WIB, dengan jumlah korban 58 orang tewas karena terkena semburan dari awan panas.
Tanggal 17 Agustus 1997	Gunung Merapi meletus pada pukul 10.30 WIB dan menyemburkan awan panas yang bercampur debu dan pasir. Awan panas mengalir di Kali Krasak sepanjang 6km dan Kali Boyong sepanjang 4-5 km
Tanggal 10 Februari 2001	Tidak ada korban jiwa pada letusan Gunung Merapi, tetapi 571 orang diungsikan.
Bulan Mei 2006	Dua relawan ditemukan meninggal terperangkap awan panas di dalam bunker Kaliadem saat Gunung Merapi meletus pada bulan Mei 2006
Bulan Oktober-November 2010	Letusan Gunung Merapi menyebabkan 151 orang meninggal dunia. Angka korban pengungsi mencapai 320.090 jiwa, 291 rumah rusak, dan satu tanggul di Desa Ngepos jebol akibat luapan lahar dingin.
Tanggal 11 Mei 2018	Gunung Merapi meletus pada pukul 07.32 WIB dengan tipe freatik. Status dinyatakan level 1 atau normal.

Dari table di atas menunjukkan aktivitas Gunung Merapi yang aktif dan bahaya yang mungkin terjadi. Penanggulangan tidak hanya aksi ketika terjadinya bencana agar dapat meminimalisir risiko terjadinya bencana itu sendiri. Di Negara Indonesia sendiri penanggulangan bencana telah bergeser dari paradigma penanggulangan bencana yang bersifat responsif (terpusat

pada tanggap darurat dan pemulihan) ke preventif (pengurangan risiko dan kesiapsiagaan), sehingga penanggulangan bencana saat ini lebih ditekankan pada tahapan pra bencana.

Menurut MunichRe (1020) bahaya bencana erupsi Gunung Merapi memberikan dampak yang berbahaya bagi lingkungan sekitar, tetapi frekuensi yang dihasilkan dari bencana tersebut lebih kecil dari bahaya bencana lain seperti banjir dan badai. Erupsi Gunung Merapi dapat menyebabkan kerusakan material di wilayah yang dilalui dan dapat menyebabkan adanya korban jiwa. Bencana vulkanik seperti erupsi gunung Merapi dirasa kurang menarik jika dibandingkan dengan bahaya kerusakan yang ditimbulkannya serta korban jiwa yang disebabkan bahaya lainnya (Estuning Tyas Wulan Mei, 2008).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Newhall et al (2000), Andrea astuti et al (2000), Camus et al (2000), dan Voight et al (2000) menunjukkan bahwa Gunung merapi dikenal sebagai salah satu gunung api paling aktif di indonesia, bahkan di dunia dengan lebih dari 80 letusan sejarah yang hampir setengahnya disertai oleh aliran piroklastik (*Pyroclastic Density Currents – PDCs*) kronologi rincian letusan tercatat sejak abad ke-19 (sembilanbelas). Jumlah letusan pada abad ke-20 (duapuluh) lebih tinggi dari abad 19 (sembilanbelas)Voight et al (2000). Hal ini kemungkinan karena peningkatan identifikasi dari kejadian dari waktu ke waktu (Ma'arif. 2015).

Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi sangat dibutuhkan juga peran serta masyarakat dan lembaga serta badan usaha yang terintegrasi sesuai dengan standar operasional prosedur. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, dikatakan bahwa untuk mendukung perubahan paradigma dari penanggulangan bencana yang hanya berorientasi pada penanggulangan kedaruratan bencana, perlu juga berorientasi pada mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang berfokus pada pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Untuk melaksanakan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, diperlukan peran masyarakat dalam suatu wadah formal berbasis masyarakat, dari, oleh, dan untuk masyarakat melalui pembentukan Kampung Siaga Bencana.

Ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia guna mengurangi resiko terjadinya bencana, baik itu secara preventif, maupun mitigasi dan kesiapsiagaan bencana hingga adanya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Program-

program tersebut ditetapkan sebagai upaya guna untuk mencapai tujuan dari penanggulangan bencana sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu untuk :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
4. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
5. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada tahap pra bencana yaitu pada situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat adanya potensi bencana, terdapat berbagai upaya yaitu :

1. Pencegahan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana.
2. Mitigasi bencana, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non struktural)
3. Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana alam melalui langkah yang tepat. Kesiapsiagaan adalah sekumpulan tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat dan perorangan untuk melakukan tindakan dalam menghadapi situasi bencana secara cepat dan efektif.

Pada tahap pasca bencana terdapat beberapa upaya, yaitu :

1. Pemulihan (recovery), yaitu suatu proses yang dilalui agar kebutuhan pokok terpenuhi.

2. Rehabilitasi, yaitu perbaikan yang dibutuhkan secara langsung yang sifatnya sementara atau berjangka pendek.
3. Rekonstruksi yaitu perbaikan yang sifatnya permanen.

Kesiapsiagaan dari prespektif siklus bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kegiatan yang dilakukan berupa pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya. Penentuan status keadaan darurat bencana. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar. Perlindungan terhadap kelompok rentan. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan kesiapsiagaan dan mitigasi yaitu, kesiapsiagaan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana atau sebelum terjadi bencana, untuk menagani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. Sedangkan mitigasi adalah mempersiapkan diri, atau setidaknya mengurangi resiko buruk dari bencana alam yang akan terjadi.

Pada letusan Gunung Merapi 2010, Perhub Sleman No.20/2011 tentang Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi, ada 4672 hektare masuk pada KRB III. Dalam aturan KRB III tidak diperuntukan bagi hunian, tetapi masih ada pengembangan hunian. Berdasarkan Perhub tersebut ada empat kecamatan yang masuk pada KRB III antara lain Turi, Cangkringan, Pakem dan Ngemplak. KRB III Gunung Merapi merupakan kawasan yang berada dekat dengan sumber bahaya yang sering dilintasi awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu, dan hujan abu lebat.

Indonesia telah memiliki 638 Kampung Siaga Bencana (KSB) yang sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 42 Kampung Siaga Bencana (KSB), salah satunya berada di Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem. Desa Harjobinangun, Pakem adalah satu dari 301 desa di D.I Yogyakarta yang rawan terjadi bencana alam. Desa Harjobinangun mempunyai KSB (Kampung Siaga Bencana) yang dibentuk pada tahun 2015, yang berjarak kurang lebih 14 kilometer dari puncak Gunung Merapi. Desa Harjobinangun mempunyai luas sekitar 552 ha dan memiliki jumlah penduduk sekitar 6809 jiwa (2019) dengan terbagi menjadi 11 padukuhan. Dengan adanya Kampung Siaga Bencana (KSB) diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan bencana, serta masyarakat diharapkan dapat mandiri dan beradaptasi dalam menghadapi potensi dari ancaman bencana yang akan terjadi seperti erupsi Gunung Merapi, Angin Puting Beliung, dan bencana lainnya.

Menurut Habibullah (2013) konsep Desa/Kalurahan Tangguh Bencana (DESTANA) dengan Kampung Siaga Bencana (KSB) terlihat bahwa konsep DESTANA memiliki konsep yang jelas, yaitu mengacu pada definisi desa sebagai wilayah administratif. Sedangkan konsep KSB tidak mengacu pada definisi kampung, hanya sebatas program dan mengacu pada wadah atau kelembagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang berkedudukan di kecamatan/desa/kalurahan/dusun.

Tujuan dibentuknya Kampung siaga bencana (KSB) untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman dan resiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.

Tujuan dibentuknya kampung siaga bencana adalah:

1. Memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan resiko bencana.
2. Membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat.
3. Mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana.
4. Menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan.
5. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana.

Desa/Kalurahan Tangguh Bencana adalah upaya pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat yaitu bentuk untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam DESTANA masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi resiko bencana yang ada diwilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan pembentukan DESTANA adalah:

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi resiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan resiko bencana.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan resiko bencana.

5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Berdasarkan maksud dan tujuan dari kegiatan KSB dan DESTANA adalah sama yaitu suatu upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Namun dalam perumusan tujuan kampung siaga bencana cenderung lebih kompleks dengan memberikan sesuatu yang baru dan upaya mengoptimalkan pada penanggulangan bencana berbasis masyarakat yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat, membentuk jejaring dan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensi dan sumber daya. Sedangkan pada tujuan desa tangguh bencana cenderung sebagai upaya peningkatan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat (Habibullah 2013).

Desa Harjobinangun memiliki 2 (dua) program yang sama, yaitu Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB), dua program ini berjalan secara bersamaan. Berbeda dengan desa-desa yang lain yang hanya memiliki satu program saja yang berjalan. Pemerintah membuat program (DESTANA) supaya masyarakat Desa Harjobinangun mampu mengantisipasi dan meminimalisir dampak dari bencana letusan Gunung Merapi. Dengan adanya Kampung Siaga Bencana (KSB) diharapkan masyarakat dapat siap dan tangguh sebelum terjadinya bencana. Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Harjobinangun merupakan desa penyanggah terakhir di KRB III yang memiliki tempat evakuasi (barak pengungsian) di Depan Balai Desa Harjobinangun. Tempat tersebut dibutuhkan oleh masyarakat agar siap menghadapi bencana. Masyarakat merupakan penerima dampak langsung dari bencana sehingga perlu diberi pembekalan agar tidak hanya siap menghadapi tetapi juga tangguh untuk menanggulangi musibah. Dengan adanya Kampung Siaga Bencana (KSB) diharapkan masyarakat dapat

bekerjasama dengan Pemerintah dalam menanggulangi bencana diwilayah tersebut. Dengan peran serta pemerintah desa dan masyarakat diharapkan dapat berkerja sama untuk menimalisir resiko bencana yang akan terjadi.

Dalam Kampung Siaga Bencana (KSB) yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dengan cepat dari berbagai dampak bencana. Kampung Siaga Bencana sendiri merupakan kegiatan penanggulangan berbasis masyarakat, mengorganisir potensi masyarakat agar terlatih siaga bencana ,tersedianya petugas masyarakat dan Peran Pemerintah Desa agar mampu mengelola sumber daya manusia, wilayah serta potensi dalam penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja atau masyarakat saja, perlu melibatkan segala pihak agar berjalan beriringan untuk terbentuknya suatu kerjasama dalam penganggulangan pra bencana maupun pasca bencana. Kesadaran masyarakat juga penting untuk peningkatan kewaspadaan dan antisipasi jika terjadi bencana. Dengan pengetahuan masyarakat tentang kesiapsiagaan akan memudahkan kampung siaga bencana dalam mengorganisir masyarakat ketika terjadi bencana sehingga dapat mengurangi resiko bencana yang akan terjadi.

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan di atas dan untuk terlaksananya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“Peran Kampung Siaga Bencana Dalam Kesiapsiagaan Bencana di Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana peran Kampung Siaga Bencana (KSB) dalam kesiapsiagaan bencana di Desa Harjobinangun, Pakem, Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dijalankan oleh Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Harjobinangun, Pakem, Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam ilmu pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang peran kampung siaga bencana dalam kesiapsiagaan.

1.4.1.2 Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penelitian sejenis, yang berkaitan tentang kampung siaga bencana.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

enelitian ini sebagai bekal dan menambah pengetahuan dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Perguruan Tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Serta pengimplementasian peneliti yang selama ini menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi yang kurang berhubungan langsung dengan masyarakat.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Memberikan kesadaran bagi masyarakat Desa Harjobinangun tentang pentingnya kampung siaga bencana dalam kesiapsiagaan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang berjudul “Kampung Siaga Bencana Sebagai Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Di Indonesia: Politik Pembangunan Dan Partisipasi Dalam Diskursus Pembangunan Kebencanaan” oleh Muhammad Belanawane S. dijelaskan bahwa Kampung Siaga Bencana (KSB) bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya bahaya dan risiko bencana, membentuk struktur siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial antara sesama anggota masyarakat, mengorganisasikan masyarakat agar terlatih siaga bencana, menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan, dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana.

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Upaya Mitigasi Bencana Wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Pasca Erupsi Gunung Merapi Desa Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta” oleh Bernadeta Evi Fatmawati dan Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si.dijelaskan bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator merupakan

salah satu peran yang dilaksanakan pemerintah dengan cara memberikan fasilitas bagi warga yang terdampak bencana untuk mengurangi risiko bencana dalam hal mitigasi. Mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah seperti pembangunan hunian sementara (hunian sementara) bagi yang bersedia direlokasi, pemasangan EWS (*Early Warning System*) atau lebih dikenal dengan sistem peringatan dini juga sebagai fasilitator dengan pemberian fasilitas berupa Hunian Tetap (HunTap) bagi warga yang bersedia direlokasi dan Pemasangan *Early Warning System* (EWS) dikawasan atau dusun yang terkena dampak bencana erupsi.

Dalam penelitian yang berjudul “Peran Pemuda Dalam Pengurangan Risiko Bencana dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh Maulana Istu Pradika, Sri Rum Giyarsih, dan Hartono dijelaskan bahwa pemuda telah berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kepuharjo melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara kolaboratif dengan anggota masyarakat yang lain. Kegiatan pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan adalah sosialisasi dan pelatihan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), pemetaan partisipatif, pemantauan dan komunikasi, simulasi atau gladi lapangan, radio komunitas, serta konservasi dan pelestarian.

Dalam penelitian yang berjudul “Asesmen Kerentanan dan Kapasitas Desa Berbasis Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Kabupaten Magelang Tahun 2011” oleh Mudmainah Vitasari dijelaskan bahwa tindakan/aksi pengurangan risiko bencana Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, II, I Kabupaten Magelang meliputi tindakan persiapan masyarakat dusun menghadapi bencana secara partisipatif bersama-sama dengan tindakan persiapan masyarakat desa menghadapi bencana secara partisipatif kemudian dilanjutkan dengan tindakan persiapan bencana Kabupaten Magelang. Rekomendasi tindakan pemulihan dan peningkatan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana meliputi

tindakan/aksi pemulihan keadaan masyarakat pasca bencana erupsi Merapi 2010 dan banjir lahar dingin 2011 kemudian dilanjutkan tindakan/aksi pengurangan kerentanan dan peningkatan kapasitas.

Dalam penelitian yang berjudul Kebijakan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana oleh Habibullah tahun 2013 dijelaskan bahwa Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas. Berbeda dengan kebijakan BNPB, Kementerian Sosial RI tidak disamping sebagai kebijakan tetapi juga melaksanakan fasilitasi langsung dalam hal pembentukan kelembagaan Kampung Siaga Bencana. Konsep kampung dalam Kampung Siaga Bencana lebih menekankan pada branding program dan bukan sebuah konsep kampung sebagai wilayah.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan satu komponen penting dalam suatu penelitian. Menurut Silalahi Uber (2009), setelah tahap perumusan masalah, tahap berikutnya adalah peneliti memberi penjelasan atas masalah penelitian yang dirumuskan. Penjelasan teoritis atas masalah empiris disebut kerangka teoritis (*theoretical frameworks*). Teori berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa dan bagaimana suatu masalah empiris. Teori yang digunakan harus relevan dengan konteks dan isi. Sebagai contoh, masalah-masalah sosial dijelaskan dengan menggunakan teori-teori sosial, masalah-masalah organisasional dijelaskan dengan menggunakan organisasi, masalah-masalah perilaku dijelaskan dengan menggunakan teori perilaku, masalah-masalah birokrasi dijelaskan dengan menggunakan teori birokrasi, atau masalah-masalah administrasi dan manajemen publik dijelaskan dengan menggunakan teori-teori administrasi dan manajemen publik. Lebih spesifik lagi misalnya, masalah-masalah konflik

dijelaskan dengan menggunakan teori konflik. Landasan untuk menemukan jawaban atas suatu masalah tertentu dalam penelitian ialah teori. Dari teori-teori tersebut kemudian diturunkan hipotesis. Membangun kerangka teoritis menyandarkan pada sejumlah konsep umum yang tersusun dari gagasan tentang fakta-fakta.

1.6.1 Peran Pemerintah Desa

Soerjono Soekanto (1987) mengemukakan definisi peran atau peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Sedangkan menurut Poerwodaminta (1995) peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat Poerwodaminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah karakter, kapasitas, posisi dan tugas yang aktif berkontribusi di dalamnya (Endarmoko, 2006)

Menurut pendapat Sedarmayanti (2004) peran dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas suatu pekerjaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran merupakan sesuatu yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peran merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi, untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya, karena setiap orang pasti akan mempunyai peran dalam kehidupannya. Dalam penerapannya,

mungkin sangat jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Hal ini akan menentukan tingkat kejelasan seseorang.

Menurut pendapat Koswara (dalam Nirwana 2017) menyatakan pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya mencapai tujuan Negara. Sedangkan menurut Ermaya Suradinata (1998) menjelaskan pemerintahan adalah proses kegiatan penyelenggaraan atas tugas-tugas dan fungsi-fungsi dari pemerintah, sedangkan pemerintah merupakan suatu statis.

Menurut Widjaja (dalam Ardianto, 2016) pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Menurut Sihombing (dalam Rahajeng, 2013) ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Fasilitator

Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, dapat menangkap aspirasi masyarakat, membuka jalan, membantu menemukan peluang, memberikan dukungan, meringankan beban pekerjaan masyarakat, menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.

2. Sebagai Pelayan Masyarakat

Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat, dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah perlu bertindak sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama.

3. Sebagai Pendamping

Pemerintah harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan.

4. Sebagai mitra

Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak bersebrangan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif, dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat.

5. Sebagai Penyandang Dana

Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola.

Pemerintahan desa merupakan sebuah bentuk perubahan dari proses pelayanan pemerintah yang berada di sektor swasta atau bekerjasama dengan masyarakat swasta. Sebuah trend dalam pemerintahan desa adalah peningkatan kepercayaan pemerintah kepada organisasi komunitas sebagai jalan untuk memenuhi partisipasi dalam perencanaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Peran grup komunitas sebagai partner pemerintah akan meningkatkan nilai dari pelayanan kepada masyarakat. Masalah manajemen tentang bencana lebih difokuskan kepada pemerintah lokal. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, pertama, manajemen bencana diimplementasikan oleh pemerintah lokal. Kedua, pemerintah lokal mempunyai peran aktif dalam operasi manajemen bencana. Ketiga, pemberian wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Keempat, kebijakan respon bencana memerlukan tempat secara lokal. Alasan-alasan tersebut mendasari manajemen bencana di wilayah lokal merupakan kunci dalam pelaksanaan bencana (Purnomo, Hadi, 2010)

1.6.2 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat diartikan sebagai tanggung jawab serta usaha seseorang dalam suatu kelompok yang melibatkan mental, pikiran, serta emosional seseorang yang mendorong untuk memberikan kerelaan kepada kelompok masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai tindakan yang turut ambil bagian dalam keikutsertaan, Menurut Tjokromidjoyo (2007) menyebutkan bahwa partisipasi yaitu keterlibatan dalam mental, perasaan serta emosional seseorang yang bertujuan untuk mencapai tanggung jawab dalam organisasi kelompok untuk memberikan sumbangan berupa daya pikiran dan perasaan untuk mencapai tujuan organisasi

Partiasipasi menurut Davit Sastroepoetro yaitu rasa tanggung jawab dalam diri seseorang yang bertujuan untuk memberikan perasaan dan daya pikir yang melibatkan emosional dan juga mental, menurut Mikkelsen (1999) pengertian partisipasi di bagi menjadi 6 bagian:

1. Partisipasi adalah sebuah sukarela dari kelompok masyarakat untuk berkontribusi serta keikutsertaan dalam mengambil sebuah keputusan yang di buat
2. Partisipasi yaitu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membangun keinginan untuk menerima serta kemampuan dalam mmemberikan tanggapan mengenai sebuah proyek pembangunan
3. Partisipasi yaitu sebuah perubahan dalam diri masyarakat yang melinatkan rasa sukarela
4. Partisipasi yaitu sekelompok orang yang terkait dalam sebuah proses yang aktif dalam mencapai inisiatif melakukan kebebasan
5. Partisipasi yaitu adanya sebuah pembicaraan antara masyarakat dengan satu kelompok staf yang melakukan penyelidikan, peninjauan, serta pelaksanaan dalam mendapatkan sebuah informasi yang berkaitan dengan dampak social
6. Partisipasi yaitu masyarakat yang terlibat dalam kehidupan, pembaruan diri serta lingkungan kelompok mereka.

Sedangkan menurut Slamet (1994) definisi pertisipasi yaitu keterkaitan dalam melaksanakan serta membuat sebuah keputusan, sehingga dapat di katakana adalah bentuk dari partisipasi aktif.

Menurut Hurrererah (2008) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut

1. Partisipasi buah pikiran

Partisipasi buah pikiran merupakan yang diberikan partisipan dalam *anjang sono*, pertemuan atau rapat.

2. Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga merupakan yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.

3. Partisipasi Harta Benda

Partisipasi harta benda merupakan yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan, dan sebagainya.

4. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran

Partisipasi keterampilan dan kemahiran merupakan yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.

5. Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial merupakan yang diberikan orang sebagai tanda keguayuban.

Partisipasi Masyarakat menurut pendapat Ristiana (2017) adalah suatu keputusan yang diutus oleh suatu Negara yang telah menganut Negara yang memiliki system demokrasi yang berlandaskan dasar Pancasila. Dalam proses mitigasi kebakaran hutan serta lahan diharapkan berjalan dengan lancar serta kondusif sehingga terciptanya suatu keputusan atau kewenangan system yang berjalan efektif.

Ristiana (2017) juga menambahkan bahwa partisipasi adalah suatu perundingan antara masyarakat serta kelompok yang terlibat dalam keputusan serta pengambilan

konsekuensi tanpa kontribusi serta partisipasi dari masyarakat akan menimbulkan suatu mitigasi kebakaran hutan serta lahan dapat berjalan dengan kondusif.

1.6.3 Kampung Siaga Bencana

Kampung Siaga Bencana (KSB) merupakan sebuah organisasi penanggulangan bencana yang berbasis pada masyarakat dan dijadikan sebagai tempat untuk program penanggulangan bencana yang dijalankan pada tahun 2011 oleh Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. Dibentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB) dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana. Cara yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat. (Kementerian Sosial 2011a).

Kampung Siaga Bencana (KSB) dibentuk untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana. Membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat. Mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana. Menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana (Kementerian Sosial 2011a).

Desa Tangguh Bencana (DTB) merupakan program dengan upaya pengurangan risiko berbasis masyarakat. DTB adalah program yang dibuat pada masa yang sama dengan KSB. Dalam DTB dijelaskan bahwa pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat merupakan segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat. DTB juga meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang

direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam DTB masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan. (Belanawane, 2016).

1.6.4 Kesiapsiagaan Bencana

Manajemen bencana memiliki beberapa siklus yang meliputi kegiatan-kegiatan tanggap darurat (*emergency response*), rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi (pengurangan risiko) dan kesiapsiagaan yang dilakukan secara berkesinambungan, tidak terbatas hanya sebatas respons semata. Pada awalnya, tindakan penanganan bencana dilakukan hanya pada tahap bahaya-bahaya yang terjadi setelah adanya bencana atau tanggapan terhadap suatu bencana. Perkembangan situasi dirasakan perlu untuk menyusun kesiapsiagaan bencana untuk menyediakan bantuan kemanusiaan yang lebih baik akibat operasi penyelamatan yang tidak terkoordinasi. Tahapan-tahapan tersebut merupakan model empat fase dalam manajemen bencana yaitu, *mitigation*, *preparedness*, *response*, dan *recovery* (Purnomo, Hadi, 2010).

Menurut Kodoatie dan Syarief (2006) dalam Purnomo (2010) peristiwa bencana memiliki karakteristik yang berbeda, namun pada hakikatnya mempunyai konsep siklus bantuan bencana yang sama dalam manajemen bencana.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana pasal 16 dijelaskan:

1. Pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
2. Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD dalam bentuk:
 - a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
 - b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
 - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat
 - e. Penyiapan lokasi evakuasi
 - f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemuthakiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
 - g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Kesiapsiagaan menurut Gillespie dan Streeter (1987) dalam Kusumasari (2014) adalah sebagai perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan dan pelatihan, simulasi, dan tindakan pra bencana lainnya yang diambil untuk tujuan utama meningkatkan keamanan dan efektivitas respons masyarakat selama bencana.

LIPI-UNESCO (2006) mendefinisikan kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan di dalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan risiko bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadinya bencana. Di dalam proses pengelolaan bencana yang direpresentasikan sebagai model siklus, peningkatan kesiapsiagaan merupakan bagian dari proses pengelolaan risiko bencana. Peranan peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana dalam suatu model pengelolaan bencana yang menerapkan konsep kembang susut (*expand-contract*), yang merepresentasikan secara lebih baik peranan dari berbagai komponen kegiatan pengelolaan bencana yang berjalan secara paralel.

Usaha-usaha kesiapsiagaan dapat dilakukan di berbagai tingkatan mulai dari tingkat nasional, provinsi/daerah/kecamatan, organisasi individual, desa/kelurahan, RW/RT, rumah tangga, dan tingkat individu/perseorangan. Berikut beberapa tujuan akan pentingnya kesiapsiagaan berdasarkan IDEP (2009):

1. Mencegah Resiko

Untuk mencegah terjadinya bencana secara keseluruhan memang susah. Tetapi ada banyak tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana yang akan terjadi.

2. Mengurangi Korban

Untuk mengurangi korban, masyarakat harus mempersiapkan diri dengan baik. Dengan mempersiapkan diri, masyarakat dapat menentukan tindakan penyelamatan diri ketika bencana akan terjadi. Masyarakat dapat melakukan tindakan tepat waktu ketika sudah dapat mempersiapkan diri dengan baik.

3. Meringankan Penderitaan

Unruk mengurangi penderitaan akibat suatu bencana, masyarakat perlu mempunyai persiapan supaya bisa cepat bertindak apabila terjadi bencana.

4. Menjalin Kerjasama

Menjalin kerjasama merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya kerjasama dari pihak lain, masyarakat dapat melakukan penanganan bencana dengan lebih baik. Agar tahap persiapan berjalan dengan baik, masyarakat diharapkan dapat menjalin kerjasama yang baik dengan pihak lain.

Kesiapsiagaan dimaksudkan dengan tujuannya adalah menjamin bahwa sistem, prosedur, dan sumber daya yang tepat siap ditempatnya masing-masing untuk memberikan bantuan yang efektif dan segera bagi korban bencana sehingga dapat mempermudah langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi layanan (PAHO, 2006). Kesiapsiagaan juga dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.

1.7. Definisi Konseptual

Menurut Singarimbun dan Effendi, (2008) definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan peneliti untuk mengoprasikan konsep tersebut di lapangan. Maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.7.1. Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa adalah suatu tugas atau perilaku yang harus dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya dalam kesiapsiagaan bencana. Secara spesifik adalah sebagai fasilitator, pelayan masyarakat, pendamping, mitra dan sebagai penyandang dana.

1.7.2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah tanggung jawab serta usaha seseorang dalam suatu kelompok yang melibatkan mental, pikiran, serta emosional seseorang yang mendorong untuk memberikan kerelaan kepada kelompok masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut

1. Partisipasi Buah Pikiran

Partisipasi buah pikiran merupakan pelaksanaan tahap awal sebelum pelaksanaan kegiatan kampung siaga bencana, yaitu sebuah penyusunan rencana kegiatan berdasarkan ide-ide atau konsep yang diusulkan masyarakat.

2. Partisipasi Tenaga

Dalam menjalankan suatu program harus mempunyai tujuan yang terkait atau sasaran program kampung siaga bencana tersebut. Pada saat terjadinya bencana anggota kampung siaga bencana melaksanakan tugasnya masing-masing.

3. Partisipasi Harta Benda

Partisipasi harta benda merupakan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan menyumbangkan harta benda yang dimiliki untuk mendukung terlaksananya program kampung siaga bencana.

4. Partisipasi Keterampilan dan Kemahiran

Partisipasi keterampilan dan kemahiran merupakan partisipasi yang dilakukan masyarakat dengan cara menyumbangkan keahlian yang dimiliki untuk membantu terlaksananya program kampung siaga bencana.

5. Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial merupakan partisipasi yang diberikan masyarakat sebagai tanda keguayuban guna terlaksananya program kampung siaga bencana.

1.7.3. Kampung Siaga Bencana

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia guna untuk melembagakan proses kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, mengorganisir potensi masyarakat terlatih siaga bencana dan tersedianya petugas atau masyarakat agar mampu mengelola sumber daya manusia, wilayah, potensi dalam penanggulangan bencana.

1.7.4. Kesiapsiagaan

Merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Jadi, kesiapsiagaan adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi suatu bencana untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif pada saat dan setelah terjadinya bencana. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan antar lain:

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
2. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat

5. Penyiapan lokasi evakuasi
6. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemuthakiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variable yang dibangun berdsarkan konsep yang sama. Dengan demikian dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

Menurut Sugiyono (2012) berpendapat bahwa definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoprasikan kontrak, sehingga memungkinkan untuk melakukan replikasi pengukuran

Menurut Kahn (dalam Agustina, 2011) teori peran (*role theory*) penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya. Maka adapun pendapat lain mengenai teori peran yaitu teori peran (*role theory*) yaitu merupakan perpaduan antara

teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi.

Peran Kampung Siaga bencana dalam kesiapsiagaan adalah peran yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam program Kampung Siaga Bencana agar meningkatkan kesiapan dan kemampuan masyarakat di Desa Harjobinangun dalam menghadapi potensi ancaman bencana yang kapan saja bisa terjadi, khususnya bencana Erupsi Merapi.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dituliskan di dalam kerangka teori, dirumuskanlah sebuah definisi operasional yang dapat membantu dalam penelitian ini, antar lain :

1.8.1. Peran Pemerintah Desa dalam Kampung Siaga Bencana

a) Sebagai Fasilitator

- 1) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 2) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana.

b) Sebagai Pelayan Masyarakat

- 1) Menyusun data terdampak bencana.
- 2) Menyediakan informasi terkait ancaman bencana.

c) Sebagai Pendamping

- 1) Pendampingan tanggap darurat langsung dari pemerintah untuk anggota kampung siaga bencana.
- 2) Melakukan penyuluhan, pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat pdari anggota kampung siaga bencana.

d) Sebagai Mitra

- 1) Melakukan uji coba penanggulangan kedaruratan bencana untuk program kampung siaga bencana yang dilakukan bersama masyarakat.
- 2) Melakukan pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini untuk program kampung siaga bencana.

e) Sebagai Penyandang Dana

- 1) Menyiapkan lokasi evakuasi untuk program kampung siaga bencana.
- 2) Membuat penganggaran dana untuk program kampung siaga bencana.

1.8.2. Peran Masyarakat Melalui Kampung Siaga Bencana

a) Partisipasi Buah Pikiran

Keikutsertaan masyarakat dalam pengenalan dan pemantauan risiko bencana.

b) Partisipasi Tenaga

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan penanggulangan bencana.

c) Partisipasi Harta Benda

Partisipasi masyarakat dengan memberikan bantuan atau fasilitas terhadap korban bencana/pengungsi.

d) Partisipasi Ketrampilan dan Kemahiran

Keikutsertaan masyarakat yang mempunyai ketrampilan dan kemahiran penggunaan teknologi sederhana dalam pemantauan ancaman bencana.

e) Partisipasi Sosial

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya sadar bencana.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dimana penelitian ini akan menggunakan dan mengumpulkan berbagai bahan empiris untuk menunjang keberhasilan penelitian. Karena penelitian ini berupaya untuk menghasilkan gambaran yang mendalam mengenai kinerja kampung siaga bencana dalam kesiapsiagaan. Mayer dan Greenwood (Silalahi, Metode Penelitian Sosial, 2009) mengungkapkan bahwa penelitian deskripsi kualitatif mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda atau peristiwa.

1.9.2. Lokasi

Lokasi Penelitian ini berada di Desa Harjobinangun Pakem Sleman Yogyakarta.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*inparticipan observatory*), wawancara mendalam (*indepth interview*) dan dokumentasi.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Bahwa dalam penelitian kualitatif, informan dipilih dan mengutamakan pandangan informan itu sendiri. Peneliti tidak dapat memaksakan kehendak untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data terhadap informan sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Moleong (2013) mengatakan manfaat penggunaan pengamatan ini adalah untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat semua sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian. Pengamat memungkinkan peneliti untuk merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek penelitian sehingga dapat memungkinkan untuk pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun pihak subyek. Observasi ini dilakukan dengan cara peneliti ikut secara langsung dan mengamati program Kampung Siaga Bencana yang sudah menjalankan tugas dan fungsinya.

Metode observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap program Kampung Siaga Bencana, apakah peran Kampung Siaga Bencana di Desa Harjobinangun sudah terlaksana dengan baik.

2. Wawancara Terstruktur

Menurut Silalahi (2009) wawancara terstruktur adalah sebuah metode pengumpulan data secara lisan yang dilakukan oleh peneliti dengan sejumlah orang sebagai narasumber atau responden. Wawancara terstruktur menggunakan daftar-daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian agar data yang diperoleh sesuai dengan konteks dan kebutuhan penelitian.

Pemilihan informan menggunakan cara *purposive sampling* yaitu pemilihan subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan (Silalahi, 2009). Pemilihan narasumber berdasarkan kebutuhan data untuk penelitian dan keterlibatan narasumber dalam proses formulasi kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana di Desa Harjobinangun Pakem. Oleh karena itu disusunlah sebuah daftar narasumber yang akan diwawancarai, yaitu :

Tabel 2
Daftar Narasumber

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan
Perangkat Desa					
1	Fajar Akbar Kurniawan, SE., MSi	L	41	S2	Kepala Desa
2	Sukandar	L	44	S1	Tatalaksana/Wakil Kepala Desa
Pengurus Kampung Siaga Bencana					
1	Hardjiwanto Tribowo, SE.	L	44	S1	Keamanan/Ketua KSB
2	Asmaji	L	51	SLTA	Sosial/Wakil Ketua KSB
3	Caecilia Sinta Citra Dewi	P	27	S1	Pangripta/Sekretaris KSB
4	Wahyu Agung Nugraha	L	40	SLTA	DANARTA/Bendahara KSB
Masyarakat Umum					

1	Agustinus Aminonis Bima Nugraha	L	32	S1	Dukuh Dusun Trojayan/Masyarakat
2	Estiyana	L	49	SLTA	TAGANA/Masyarakat
3	Rita Wulandari	P	41	S1	Relawan/Masyarakat
4	Roko Rahendro	L	26	S1	Karang Taruna/Masyarakat
5	Rustni	P	34	SLTA	Masyarakat
6	Surono	L	42	SLTA	Masyarakat

3. Dokumen Resmi

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, aturan sebuah lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga social dan dokumen eksternal dapat digunakan untuk menelaah konteks sosial penelitian (Moleong, 1989).

1.9.4. Jenis Data Dan Sumber Data

1.9.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Dalam Silalahi (2012) menjelaskan pertanyaan tentang pengetahuan berkenan dengan apa yang orang ketahui dalam satu bidang atau satu topik, kedalaman, atau akurasi dari informasi. Pertanyaan-pertanyaan pengetahuan umumnya dilakukan atau diajukan untuk mengevaluasi sebuah program pelatihan untuk menemukan apakah subjek yang dipelajari sudah

dipahami atau belum. Pertanyaan-pertanyaan pengetahuan dapat mengukur apakah satu populasi mengetahui tentang satu kebijakan atau isu.

1.9.4.2. Sumber Data

Sumber data adalah pertimbangan kelayakan untuk mengambil informasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Moleong (2010) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Sumber data penelitian ini meliputi pihak pemerintah, pihak kampung siaga bencana, dan tokoh masyarakat. Pemilihan sumber data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber sehingga data yang didapat valid atau diakui kebenarannya. Pertimbangan lain adalah sumber data memiliki waktu bila peneliti memerlukan informasi dari mereka untuk pengumpulan data dari peneliti. Peneliti mengambil sumber informasi (*key informan*) adalah sumber informasi yang memiliki informasi yang cukup tentang fokus penelitian adalah tokoh masyarakat yang benar-benar tau kondisi lapangan secara baik dari segi sudut pandang pihak pemerintah maupun dari segi sudut pandang kampung siaga bencana.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah pihak pemerintah, pihak kampung siaga bencana, dan tokoh masyarakat sehubungan dengan kesiapsiagaan bencana.

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah Profil Desa Harjobinangun tahun 2019, susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kalurahan

Harjobinangun, Pembentukan Pengurus dan Tim Koordinator Kampung Siaga Bencana (KSB) 2020, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Harjobinangun Kecamatan Pakem Tahun Anggaran 2020

1.9.5. Teknik Analisis Data

Dijelaskan oleh Pohan (dalam Prastowo, 2011) bahwa data kualitatif adalah semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014) analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti mulai mencari arti dari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.